

## **DUKUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

*Millenium Development Goals (MDG's)* atau tujuan pembangunan millennium adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen tersebut dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Jawa Tengah sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia juga ikut serta mendukung komitmen pemerintah tersebut, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target MDG's.

Kemiskinan di Jawa Tengah telah menurun dari 6,9 juta jiwa pada tahun 2003 menjadi 5,9 juta jiwa pada tahun 2006 (Susenas). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 sebesar 68,9 menduduki peringkat 4 secara nasional.

Memperhatikan sasaran Millenium Development Goals (MDG's) dan Kesepakatan Dakkar untuk Pendidikan Untuk Semua (PUS); Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan pemberdayaan perempuan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender dan Forum Kajian Gender; penurunan Angka kematian anak dengan menekan terjadinya gizi buruk pada balita, meningkatnya angka kesehatan ibu dengan menekan angka

kematian ibu melahirkan; meningkatnya angka kesakitan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya; Cakupan pelayanan air bersih perkotaan dan perdesaan serta cakupan sanitasi dan persampahan sebanding dengan rata-rata nasional dan target *Millenium Development Goals (MDGs)*; dan kerjasama sinergitas pengelolaan potensi sebagai tantangan pembangunan perwilayahan ke depan telah dirancang dan dilaksanakan dengan berbagai bentuk dan pola kerjasama.

Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selaras dengan "Grand Strategy" dilaksanakan melalui 5 (lima) pilar yaitu :

1. Perluasan Kesempatan, ditujukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2. Pemberdayaan Masyarakat, dilakukan untuk mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
3. Peningkatan Kapasitas, dilakukan untuk pengembangan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
4. Perlindungan Sosial, dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan kepala rumah tangga, fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, kemampuan berbeda (penyandang cacat) dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.
5. Kemitraan Regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional dan internasional guna mendukung pelaksanaan ke empat strategi di atas.

## **B. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

### **1. Kondisi Umum**

Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111°30' Bujur Timur merupakan salah satu Provinsi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 mencapai 33,18 juta jiwa, dengan 8,19 juta pada usia 0–14 tahun, 21,78 juta pada usia 15–64 dan 2,49 juta pada usia 65 keatas. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 8.844.220 KK, dimana 2.171.201 KK diantaranya termasuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Sedangkan secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota dan terdiri dari 566 kecamatan yang meliputi 7.804 desa dan 764 kelurahan.

Luas wilayah pada tahun 2006 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia), sedangkan luas wilayah laut (12 mil) adalah 15.290,15 km<sup>2</sup>. Secara umum kondisi iklim sepanjang tahun 2006 berkisar antara 24,8° C sampai dengan 31,8°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 77 persen sampai dengan 85 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Sempor Kebumen sebesar 3.948 mm dan hari hujan terbanyak Cilacap sebesar 277 hari.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2006 mencapai 5,33 %, dengan 3 sektor utama penyokong pada PDRB, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor Listrik, Gas dan Air Minum serta sektor Jasa-jasa, sedangkan laju inflasi pada tahun 2006 sebesar 5,45%, sedangkan inflasi mencapai 6,03 %. Sementara itu PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 8.300.000 sedangkan PDRB per kapita menurut harga berlaku sebesar mencapai Rp. 281.996.709,11.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Di sisi penggunaan, pertumbuhan ekonomi tahunan

tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi. Pada tahun 2006 ketiga sektor ekonomi yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,56 % dengan *share of growth* 1,78 %, diikuti sektor jasa-jasa yang tumbuh sebesar 9,40 % dengan *share of growth* 0,94 % dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang tumbuh sebesar 4,38 % dengan *share of growth* sebesar 0,91 %. Ketiga sektor itu didukung oleh beberapa sektor lain yang tumbuh cukup tinggi, seperti sektor pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air bersih.

## **2. Upaya Pencapaian MDG's di Provinsi Jawa Tengah**

Strategi penanggulangan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, perlindungan sosial serta kemitraan regional dan antar daerah telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan serta telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang panjang. Capaian yang telah diperoleh Provinsi Jawa Tengah terbukti pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (*BPS Provinsi Jawa Tengah*) dari sebesar 4,07 % pada tahun 2003 menjadi 5,55 % tahun 2006, pendapatan per kapita juga meningkat dari Rp 4,8 juta pada tahun 2003 menjadi Rp 5,2 juta tahun 2006, IPM meningkat dari 66,2 pada tahun 2003 menjadi 68,9 pada tahun 2006, dan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin dari 6,9 juta jiwa pada tahun 2003 menjadi 5,9 juta jiwa pada tahun 2006.

Pembangunan bidang pendidikan di Jawa Tengah selama ini telah dilakukan melalui upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan Iptek dan kebutuhan pasar kerja, dengan memperhatikan sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen Internasional di bidang pendidikan seperti Sasaran Millenium Development Goals (MDG's) dan Kesepakatan Dakkar untuk Pendidikan Untuk Semua (PUS), aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 107,17 % menjadi 109,12 %, SMP/MTs meningkat dari

71,55 % menjadi 77,68 % dan proporsi penduduk buta huruf dari 13,27 % menjadi 10,46 % masing-masing pada tahun 2003 dan tahun 2006.

Upaya untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan pemberdayaan perempuan telah dilakukan antara lain melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender dan Forum Kajian Gender. Selain itu juga dilakukan pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen-dokumen perencanaan.

Angka kematian bayi mendapat perhatian secara khusus melalui berbagai program dan kegiatan untuk menekan terjadinya gizi buruk pada balita, beberapa indikator keberhasilan bidang kesehatan ditunjukkan dengan indikator mortalitas yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Tengah cenderung menurun dari 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2000 menjadi 14 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2005. Sedangkan meningkatnya angka kesehatan ibu ditandai dengan semakin turunnya angka kematian ibu karena proses persalinan serta masih tetap dilaksanakannya program keluarga berencana, hal tersebut tercermin dengan menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 152 pada tahun 2000 menjadi 115 per 100.000 kelahiran tahun 2003. Sedangkan prevalensi gizi kurang pada anak balita menurun dari 14,08% pada tahun 2003 menjadi 10,51 % tahun 2006 (*hasil pemantauan status gizi*).

Berbagai upaya untuk memerangi merebaknya HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya terus dilaksanakan antara lain dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan mengintegrasikan lintas sektor dan LSM Peduli AIDS, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA), mempercepat pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada kelompok resiko tertular, ibu dan anak, memudahkan ODHA untuk memperoleh obat Anti Retroviral (ARV) melalui pelayanan di Klinik *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) dan perawatan, dukungan serta pengobatan (*Care, Support and Treatment*) baik di rumah sakit maupun di komunitas.

Cakupan pelayanan air bersih perkotaan lebih kurang 39,86 persen dan perdesaan 12,6 persen. Cakupan sanitasi lebih kurang 7,2 persen dan persampahan lebih kurang 71 persen sampah terangkut. Kondisi tersebut sebanding dengan rata-rata nasional dan target *Milenium Development Goals (MDGs)*.

Kerjasama sinergitas pengelolaan potensi merupakan tantangan pembangunan perwilayahan ke depan yang secara konsisten terus dilaksanakan, hal tersebut mengingat semakin terbatasnya sumber daya alam dan adanya arus perdagangan bebas yang semakin kuat sehingga kawasan strategis perlu didorong dan diperkuat eksistensinya.

### **C. POLA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH**

Arah Kebijakan Pokok Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan melalui program-program *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growht* yang berorientasi pada pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai strategi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan dana stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif, bantuan sosial (antara lain melalui program Subsidi Langsung Tunai, Beras Miskin, Sektoral Pusat/ Daerah, program khusus, dll); secara tidak langsung melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi, Pemberdayaan masyarakat; Penguatan kelembagaan dan Perlindungan sosial (antara lain melalui program Bantuan Kepada Kabupaten/ Kota, Sektoral Pusat/ Daerah, dan program khusus lainnya). Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan Di Jawa Tengah ditempuh melalui :

1. **Pengurangan pengeluaran**, melalui :
  - a. Bidang Pendidikan, melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), dan Bantuan Bea Siswa Keluarga Miskin.
  - b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana, melalui penanganan tindakan medis, operatif keluarga miskin, penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang, dan pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) serta bantuan alat kontrasepsi dan obat / pil KB.
2. **Peningkatan Pendapatan**, melalui :
  - a. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, melalui pengembangan wirausaha, pengembangan pendidikan dan pelatihan wirausaha serta pemberdayaan usaha skala mikro.
  - b. Bidang Sosial, melalui Bantuan Modal Usaha bagi Penduduk Miskin.
  - c. Bidang Ketenagakerjaan, melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha termasuk pengiriman transmigrasi serta pelatihan ketrampilan tenaga kerja.
  - d. Bidang Perumahan dan Pemukiman diantaranya pemugaran rumah kumuh dan padat di perkotaan, korban bencana alam dan penyediaan air bersih serta pembangunan sanitasi.

Sasaran penanganan kemiskinan di Jawa Tengah dilaksanakan pada:

- 1) Prioritas utama : Penduduk Sangat Miskin 348.893 RTM, setara 1.395.572 jiwa,
- 2) Prioritas kedua : Penduduk Miskin sebanyak 1.544.513 RTM, setara 6.178.052 jiwa,
- 3) Prioritas ketiga : Penduduk Hampir Miskin sebanyak 1.277.795 RTM, setara 5.111.180 jiwa.

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan dengan menggunakan berbagai sumber dana. APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2003 sebesar Rp 4.500.600.725,- tahun 2004 Rp 10.035.000.000,- tahun 2005 sebesar Rp 4.874.000.000,- tahun 2006

sebesar Rp 132.729.379.000,00 dan tahun 2007 sebesar Rp 327.531.369.407,- Anggaran tersebut ada yang dilaksanakan melalui SKPD maupun diberikan langsung kepada Kabupaten/ Kota melalui Dana Bantuan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan upaya penanganan yang telah dilaksanakan, terdapat penurunan prosentase angka kemiskinan yang signifikan di 11 Kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Sragen, Banyumas, Banjarnegara, Purworejo, Blora, Pati, Batang, Semarang, Grobogan, Pemalang, Boyolali dan Kota Pekalongan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Purbalingga, Banjarnegara dan Wonosobo sebagai daerah percontohan pelaksanaan MDG's dengan memberikan bantuan senilai:

Kabupaten	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
Banjarnegara	n.a.	n.a.	1.602.280.000	312.500.000
Wonosobo	n.a.	n.a.	n.a.	39.280.299.000
Sragen	47.000.000	1.243.400.000	998.487.000	n.a.
Purbalingga	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kota Semarang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Bagi Provinsi Jawa Tengah, kemiskinan merupakan issue strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Hal tersebut terbukti selain di dalam Renstra Jawa Tengah (Perda No. 11/2003), Pergub 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra, Keputusan Gubernur No. 412.6.05/55/2006 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan juga (TKPK) di dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah tahun 2005-2025, kemiskinan merupakan salah satu dari issue strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Terkait dengan target tujuan pembangunan millenium yang harus tercapai pada tahun 2015, maka Provinsi Jawa masih harus bekerja keras untuk dapat mencapai target tersebut, mengingat upaya

penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan.

#### **D. PENUTUP**

Tujuan pembangunan Millenium yang ditargetkan untuk dapat dicapai pada tahun 2015 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam penanganan permasalahan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan bukan hanya masalah Jawa Tengah maupun Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia. Dilihat dari berbagai program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan besarnya sumber dana yang telah dikeluarkan, kemiskinan di Jawa Tengah tetap masih menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk diatasi walaupun jumlah penduduk miskin sudah semakin berkurang. Hal tersebut terjadi antara lain karena upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terpadu yang harus dilakukan oleh semua pihak termasuk juga masyarakat miskin itu sendiri dengan komitmen yang kuat dari semua unsur pimpinan baik Pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ikut mendukung dan melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Terkait dengan sosio-kultur masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*), yaitu sebuah upaya untuk mengurangi bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin. Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi pengampu masih perlu dioptimalkan, terutama dalam hal

penentuan target dan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan (termasuk kelengkapan data maupun alokasi anggaran), secara berjenjang dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih maupun terlewatnya sasaran penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan millenium (MDG's) yang harus dapat tercapai pada tahun 2015 pada umumnya dan juga untuk mencapai tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, penanganan kemiskinan memerlukan kerja keras semua pihak, komitmen dari pemerintah dan partisipasi dari masyarakat miskin itu sendiri.

Pada dasarnya kemiskinan tidak akan dapat dihilangkan dari muka bumi, namun demikian harus dilakukan upaya agar masyarakat yang masuk dalam kriteria miskin dapat memperoleh hak-hak dasar kebutuhan hidupnya. Untuk itu prioritas penanganan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sumberdaya yang ada, tanpa ketergantungan dari pihak lain agar penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas. Agar program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat benar-benar memperoleh hasil seperti yang diinginkan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi serta penilaian atas pelaksanaannya, agar dapat diketahui program dan kegiatan apa saja yang perlu untuk dilanjutkan bahkan diakselerasikan maupun untuk diketahui program dan kegiatan apa saja yang tidak diperlukan lagi.

## **BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH**